

PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA,
TRANSPARANSI, DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA TEGALREJO KECAMATAN SAWIT KABUPATEN
BOYOLALI



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Drajat Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun oleh:

IRMA EKA SEVIOLA

20220042

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Irma Eka Seviola
Nim : 20220042
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana
Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di
Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali
Disetujui dan Disahkan
Hari : Rabu
Tanggal : 21 Agustus 2024

Pembimbing



Aditya Liliyan, SMB., M.M.

NIDN: 0606118902

Mengetahui

Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta



Aditya Liliyan, SMB., M.M.

NIDN: 0606118902

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Irma Eka Seviola
Nim : 20220042
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

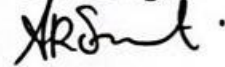
Disetujui dan Disahkan

Hari : Rabu
Tanggal : 18 September 2024

Tim Penguji

Ketua : Ari Susanti, S.Pt., M.M
Anggota : Aditya Liliyan, S.M.B., M.M

Tanda Tangan



Mengetahui,
Ketua STIE Surakarta



Dr. Budi Istiyanto. S.E..M.M..M.H

NIDN. 0625127401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA,
TRANSPARANSI, DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin, atau meniru orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 21 Agustus 2024

Yang memberi pernyataan


Irma Eka Sevibla

MOTTO

Dewasa adalah ketika kau mengerti setiap pesan dan omelan ibumu sangat berharga bagi kehidupan kita.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Kuasa memberikan penolongan ridho dan petunjuk sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doa dari semua pihak yang telah ikut serta dalam penyelesaian penyusunan Skripsi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua ku, Bapak Sukarno dan Ibu Warsini cinta pertama ku yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi, dan doa yang tiada henti dalam setiap perjalanan hidupku. Bapak, ibu harus ada selalu dalam setiap perjalanan dan pencapaian hidupku, sehat selalu, dan panjang umur.
2. Suamiku, Dwi Suryono yang selalu menyayangi dan mencintai apapun kekuranganku. Terima kasih telah memberikan dukungan(baik finansial maupun nonfinalsial, semangat, tenaga sampai penyusunan skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
3. Lintang Maharani, putri kecilku mama sangat menyayangi mu terima kasih telah memberikan pelajaran baru sebagai seorang ibu yang kuat. Terima kasih sudah menemani mama dalam melakukan penelitian, wawancara, dan sampai selesainya skripsi ini.

4. Semua keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi.
5. Terakhir, yang tidak kalah pentingnya saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini. Ini merupakan pencapaian yang patut kamu banggakan karena menjadi Sarjana disaat mempunyai seorang anak dan sebagai ibu rumah tangga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, TRANSPARANSI, DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Sekolah Ilmu Ekonomi Surakarta. Keberhasilan dalam penulisan ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto, S.E.,M.M.,M.H. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Bapak Aditya Liliyan, S.M.B.,M.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan ikhlas dalam memberikan arahan, bimbingan, dan saran yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Nur Kholis selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

4. Seluruh dosen dan karyawan Sekolah Ilmu Tinggi Ekonomi Surakarta yang telah mendidik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada penulis.
5. Aparat dan masyarakat Desa Tegalrejo yang telah sudah mau meluangkan waktu nya dan membantu kelancaran selesainya skripsi ini.
6. Kedua orang tua, suami dan seluruh keluarga penulis yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan menyelesaikan penulisan skripsi.

Akhir kata, kesempurnaan hanya milik Allah SWT, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekuarangan, tetapi penulis berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu pengetahuan.

Sukoharjo, 21 Agustus 2024

Irma Eka Seviola

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Pernyataan Keaslian Karya Tulis Skripsi	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	x
Abstrak	xi
Abstract	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Teori yang Relevan.....	8
B. Penelitian Terdahulu	11
C. Kerangka Pikir.....	13
D. Hipotesis.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	19

A. Objek Penelitian	19
B. Jenis dan Sumber Data	19
C. Populasi dan Sampel	20
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Definisi Operasional.....	23
F. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV Pembahasan	34
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	34
B. Identitas Responden (Deskripsi Responden)	34
C. Analisis Data	35
D. Pembahasan	45
BAB V Penutup	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	47
Daftar Pustaka.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2 Definisi Operasional.....	23
Tabel 3 Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin.....	34
Tabel 4 Deskripsi responden berdasarkan usia.....	35
Tabel 5 Analisis Data Deskriptif.....	35
Tabel 6 Hasil pengujian Validasi.....	36
Tabel 7 Hasil pengujian Reabilitas.....	38
Tabel 8 Hasil Uji Normalitas.....	38
Tabel 9 Hasil Uji Multikolinieritas.....	39
Tabel 10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	41
Tabel 11 Hasil Uji T.....	42
Tabel 12 Hasil Uji F.....	44
Tabel 13 Hasil Uji Koefisien Determinan.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	14
Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	49
Lampiran 2 Hasil Uji SPSS 26.....	54
Lampiran 3 Data Tabulasi.....	60

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat studi kasus desa Tegalrejo kabupaten Boyolali. Variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa. Sedangkan variabel dependennya adalah kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Selain itu teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling yang pemilihan sampelnya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan 90 responden. Data diperoleh dengan cara membagikan kuesioner. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskripsi kuantitatif dengan program SPSS versi 26. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat hal ini dibuktikan dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa setiap aliran dana yang masuk dan keluar telah disajikan dalam laporan keuangan yang di susun secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi juga telah dilakukan dengan adanya bukti banner yang terpasang pada halaman depan kantor kelurahan. Kebijakan desa cukup baik dengan membuat kebijakan yang memprioritaskan pembangunan daerah dan kemudian dilaksanakan secara efektif guna meningkatkan sarana dan prasarana dan menanggulangi kemiskinan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kata kunci : akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa, kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of accountability in the management of village fund allocation, transparency and village policies on the welfare of the community in the case study of Tegalrejo village, Boyolali district. The independent variables in this research are accountability in managing village fund allocation, transparency and village policy. Meanwhile, the dependent variable is community welfare. This research uses quantitative methods. Apart from that, the sampling technique used was purposive sampling, where the sample selection was based on predetermined criteria with 90 respondents. Data was obtained by distributing questionnaires. Research data analysis uses quantitative descriptive analysis with the SPSS version 26 program. Based on the results of the analysis carried out in this research, it shows that accountability in managing village fund allocation, transparency and village policy have a positive effect on community welfare, this is proven in implementing accountability in managing village fund allocation in each The flow of incoming and outgoing funds has been presented in financial reports which are prepared in detail and can be accounted for. Transparency has also been carried out with evidence of a banner installed on the front page of the sub-district office. Village policy is quite good in making policies that prioritize regional development and then implementing them effectively to improve facilities and infrastructure and overcome poverty so as to improve the welfare of the community.

Keywords: accountability in managing village fund allocation, transparency, village policy, community welfare

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk membuat laju pembangunan nasional semakin serasi dan seimbang, pemerintah Indonesia saat ini terus berusaha untuk meningkatkan pelaksanaannya. Akibatnya, ada komponen pemerataan pembangunan dan hasilnya mempengaruhi kepentingan masyarakat secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa adalah bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia ketika desa dibangun. Dengan demikian, untuk mengatur dan menjaga kepentingan masyarakatnya sendiri, desa memiliki kewenangan tugas, dan kewajiban. Selain itu, pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk memiliki kemampuan yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dan masyarakatnya secara bersamaan, yang akan berdampak pada peningkatan potensi desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan untuk mengendalikan keuangan mereka sendiri, dengan membentuk Alokasi Dana Desa.(Sari & Mildawati, 2020)

Dalam akuntabilitas, pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dan menggunakan sumber daya yang tersedia dan telah diberikan. Dengan

kebebasan berpendapat dan transparansi, akuntabilitas dapat tumbuh dan berkembang. Akibatnya, pemerintah harus benar-benar menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan publik adalah satu.(Maolani, 2023)

Warga negara mempunyai hak untuk mengetahui setiap tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat ataupun daerah. Transparansi diharapkan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Selain itu, pengelolaan dan penyediaan informasi yang lebih baik di lingkungan badan publik akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Selain itu, hal tersebut memiliki kemampuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.(N Siti Maryam, 2017)

Keterbukaan keuangan berarti bahwa semua orang dapat mengakses informasi tentang sumber daya keuangan dan jumlah mereka, serta bagaimana informasi ini digunakan dan ditanggung.(Sari & Mildawati, 2020) Ini juga berarti bahwa bukan hanya pihak-pihak yang terlibat yang dapat memiliki pemahaman tentang informasi yang akan dilaporkan, tetapi masyarakat umum juga dapat mengaksesnya dengan mudah, sehingga hak publik untuk mendapatkan informasi dihormati.

Salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka adalah transparansi dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa. Prinsip transparansi memastikan bahwa setiap warga dapat mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pemerintah secara bebas. Pengelolaan keuangan desa dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.(Desa et al., 2018) Semuanya harus dilakukan dengan cara yang terorganisir dan disiplin dalam pengeluaran dan berdasarkan prinsip akuntabel, transparan, dan terlibat (Permendagri 113 tahun 2014).

Dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dipatuhi oleh semua masyarakat disebut kebijakan pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus mendapatkan dukungan dari semua masyarakat, serta partisipasi dalam mentaati dan menjalankan kebijakan tersebut. Untuk memenuhi kewajiban desa, aparat desa harus membuat kebijakan, yang tetap diawasi oleh pemerintah kota atau kabupaten. Kebijakan yang dibuat di setiap desa pasti berbeda karena norma yang ditetapkan di desa tersebut berbeda. Oleh karena itu, setiap desa memiliki kemampuan untuk memutuskan mandiri dan menetapkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Tingkat kesejahteraan yang rendah menyebabkan keterlambatan, kemiskinan, dan kemerosotan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, pemerintah mengalokasikan dana secara merata untuk

pelaksanaan program-program yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat dicapai melalui peningkatan pemerataan pembangunan dan konsekuensi dari kebijakan kinerja masyarakat dan pembangunan sektoral, prioritas di wilayah perkampungan. Pemerintah melakukan pembangunan desa sebagai topik pembangunan dan sebagai upaya komunitas untuk menerapkan pembangunan yang didasarkan pada keinginan warga untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pemerintah melakukan pembangunan desa untuk memperbaiki pemerataan pembangunan dan hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Hampir semua orang di Indonesia memilih untuk tinggal di daerah pedesaan karena mereka memiliki banyak sumber daya alam, banyak penduduk, dan akses ke aset melalui Alokasi Dana Desa (ADD).(Sari & Mildawati, 2020)

Dana desa harus disediakan dan digunakan sesuai dengan undang-undang pemerintah. Akan tetapi, pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab untuk mengelola Alokasi Dana Desa masih dapat menyalahgunakan atau tidak tepat sasaran.(Sari & Mildawati, 2020) Dibutuhkan peningkatan kinerja aparatur desa dan badan pengawasan desa, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana pemerintah. Salah satu program pemerintah yang sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan desa adalah alokasi dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terdapat fenomena yaitu penyaluran dana bantuan tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat yang komplain kenapa tidak mendapat bantuan tersebut. Sehingga ada warga yang menemui aparat desa dan meminta untuk diusulkan agar mendapatkan bantuan itu. Bantuan yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat yang miskin tetapi masih ada orang yang mampu mendapatkan bantuan itu juga. Oleh karena itu, akuntabilitas desa harus dijalankan dengan baik, transparansi harus dilakukan dengan sejelas-jelasnya kepada masyarakat dan kebijakan desa harus diketahui oleh masyarakat terlebih dahulu sebelumnya program itu direalisasikan.

Penelitian terdahulu terkait dengan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh (Reza Karlina, 2022) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pembangunan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan studi Desa Cibodas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa semua variabel x berpengaruh dengan variabel y. Perbedaan dengan penelitian ini adalah perbedaan dan penambahan variabel yaitu variabel transparansi dan variabel kebijakan desa.

Lalu perbedaan pada tempat atau lokasi penelitian, waktu penelitian, dan fokus penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah di desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Waktu penelitian dilakukan pada periode 2024. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui seberapa akuntabel pengelolaan keuangan dana desa, seberapa

penting alokasi dana desa, dan bagaimana transparansi dan kebijakan pemerintah desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”** di Desa Tegalrejo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, dalam penelitian ini rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ?
2. Apakah transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ?
3. Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh transparansi pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penulis sangat berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi orang lain, termasuk peneliti berikutnya. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan subjek akuntansi pemerintahan.

2. Secara Praktis

a) Penelitian ini memberikan kemampuan bagi peneliti untuk berpikir kritis dan mengetahui secara langsung bagaimana keadaan terjadi di lingkungan masyarakat. Dan digunakan oleh peneliti sebagai syarat menyelesaikan studi.

b) Diharapkan penelitian ini juga dapat membantu pemerintah desa memprioritaskan cara penggunaan dana desa agar masyarakat desa lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. Stewardship Theory

Menurut stewardship theory, manusia pada dasarnya dapat dipercaya, dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan adil terhadap orang lain. Stewardship dalam sebuah organisasi yang melihat kepemimpinan sebagai elemen penting untuk mencapai tujuan organisasi. Teori stewardship menggambarkan situasi di mana manajer atau eksekutif memprioritaskan kepentingan organisasi, menghindari tujuan pribadi, dan mungkin termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada pimpinannya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 8, Nomor 12, Desember 2019 4 sistem pemerintahan, pemerintah bertanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Karena Steward berusaha untuk mencapai tujuan organisasi, perilakunya tidak akan meninggalkan organisasi. Selain itu, pemerintah melakukan berbagai rencana acara..(Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis et al., 2022)

2. Akuntabilitas

Menurut (Sari, 2019.), akuntabilitas berarti bahwa pemegang amanah bertanggung jawab untuk memberikan gambaran tentang

kinerja organisasi kepada pimpinan dan pihak yang membutuhkannya. Mereka harus membuat laporan yang mampu dipertanggungjawabkan atas pengelolaan sumber pendanaan atau keuangan, dengan menggunakan prinsip perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

3. Alokasi Dana Desa

Menurut (Alkalah, 2016), Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada setiap desa untuk mendukung segala bentuk program dan kegiatan desa guna membantu pemerintah mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah No. 9 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa menyebutkan bahwa tujuan alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Membiayai program pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.

4. Transparansi

Menurut (Farida dkk, 2018), transparansi adalah ketika pemerintah membuat kebijakan keuangan daerah sehingga publik tahu dan dapat

melihat bagaimana mereka dilaksanakan. Pada akhirnya, transparansi pengelolaan keuangan akan menciptakan pertanggungjawaban horizontal antara pemerintah daerah dan masyarakatnya, yang menghasilkan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif terhadap tujuan mereka.

5. Kebijakan Desa

Kebijakan adalah aturan dan peraturan yang digunakan dalam menjalankan program untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara kebijakan desa, meskipun kecil dan mencakup wilayah administrasi desa sendiri, dibuat oleh hukum dan dimiliki oleh setiap pemerintah. Peraturan desa adalah kebijakan yang mengatur desa, yang merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi. Tujuan peraturan desa adalah untuk memberikan otonomi dan tanggung jawab. Ini karena desa berada di bawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota atau kabupaten. Namun demikian, desa tetap memiliki otoritas dan hak untuk ikut serta dalam pembangunan nasional dan pembangunan desanya sendiri.

6. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi yang menjelaskan ukuran tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat disebut kesejahteraan masyarakat. Sebuah masyarakat dapat dianggap sejahtera jika kebutuhan dasar terpenuhi, seperti rumah yang layak, makanan yang layak, biaya pendidikan dan

kesehatan yang rendah, atau kondisi di mana setiap orang dapat memaksimalkan manfaatnya sesuai dengan anggaran mereka, dan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan untuk mengetahui apakah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini khususnya memfokuskan pada pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1	Umami dan Nurodin (2017)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Metode deskriptif dan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif	Menunjukkan akuntabilitas dan transparansi sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
2	Sari (2018)	Pengaruh Penggunaan ADD,	metode deskriptif kuantitatif	Menunjukkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa,

		Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat		akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat.
3	Dura (2018)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	metode deskriptif kuantitatif	Menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh bersama- sama untuk

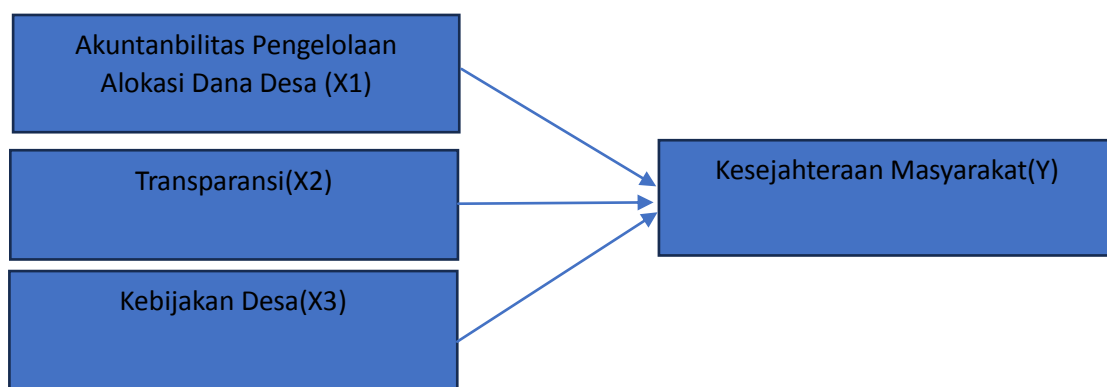
				mensejahterakan masyarakat.
4	Dewi Kusuma W (2020)	Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo	metode deskriptif kuantitatif	Menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa Sidoharjo. Sedangkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di desa Sidoharjo.

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2024

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan

desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Berikut bagan kerangka pikir untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen (X) dan 1 variabel dependen (Y). Variabel independen (X) antara lain Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1), Transparansi (X2), Kebijakan Desa (X3), variabel dependen (Y) yaitu Kesejahteraan Masyarakat. Sebagai berikut bagan kerangka pikir dari penelitian tersebut:



Gambar 1. Kerangka Bepikir

Sumber : Data Primer Diolah, 2024

D. Hipotesis

1. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Untuk memberdayakan masyarakat, dana harus digunakan dengan baik terutama untuk mengembangkan ekonomi desa. Selama proses perencanaan pembangunan masyarakat, pemerintah desa selalu terlibat dalam pemberdayaan masyarakat desa. Dengan alokasi Dana Desa

yang tepat sasaran, pemberdayaan masyarakat desa dapat menjadi sangat mandiri dan produktif.

Sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, dan pemerintah desa harus berperan aktif dalam mengelola pemberdayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Pemerintah desa dapat mempererat hubungannya dengan masyarakatnya dengan memberikan dana yang mudah dan layanan untuk mencukupi kebutuhan mereka sesuai dengan peraturan yang ada. Ini akan membantu mencapai tujuan kesejahteraan bersama.

Kebijakan Alokasi Dana Desa mempunyai tujuan umum yang sama yaitu memperbaiki praktik pemerintah kabupaten dalam memberikan otoritas, layanan, dan bantuan keuangan kepada pemerintah paling bawah, yaitu desa. Metode ADD mengubah rancangan kebijakan pemerintahan kabupaten dari dominan dan sentralistik menjadi responsif, terlibat, dan dijalankan secara desentralisasi. Kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat desa diharapkan dapat dicapai melalui fleksibilitas yang dihasilkan dari pendekatan ADD ini.

Dalam penelitian, Komang, Tungga, dan Pradana (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa yang efektif. Hasil menurut (Rianti, 2020) yaitu Salah satu prinsip pertanggungjawaban publik adalah akuntabilitas, yang berarti bahwa

proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan dan masyarakat.

H1 : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Keterbukaan pemerintah desa tentang pengelolaan dana dengan memberikan informasi melalui berbagai media, sehingga masyarakat dan pihak yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mengaksesnya. Desa mempunyai informasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan keuangan desa, harus digunakan dengan cermat. Pada akhirnya, transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menciptakan pertanggungjawaban horisontal antara pemerintah daerah dan masyarakatnya. Ini akan menghasilkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Selain itu, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat karena masyarakat berpartisipasi dalam mengelola keuangan desa untuk membiayai pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut penelitian (Asrul, 2023) masyarakat akan lebih mempercayai pemerintah desa jika pengelolaan keuangan desa terlihat transparan. Dengan kepercayaan ini, pemerintah desa dapat menepis

kecurigaan dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam pengelolaan keuangan desa. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkatkan kinerja pemerintahan dari sebelumnya. sehingga masyarakat akan merasa nyaman dengan peningkatan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah desa berfungsi sebagai pengelola keuangan desa yang dipercaya oleh masyarakat berdasarkan peraturan. Untuk setiap tahap dari perencanaan, pelaksanaan, penawasan, dan pelaporan kegiatan yang telah dibiayai, pemerintah pusat menginginkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian (Fitriyani & Priyono, 2023) bahwa transparansi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hipotesis dinyatakan diterima karena sejalan dengan hipotesis yang diajukan.

H2 : Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

3. Pengaruh Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Sangaji (2018), pemerintah mampu memberikan layanan dan berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan desa, yang membuat kebijakan desa berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Membuat kebijakan dan pelaksanaan program desa bergantung pada dana desa.

Pemerintah desa diberi otonomi oleh pemerintah daerah untuk mengurus desanya, terutama dalam hal pelayanan, keswadayaan, inisiatif, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan peran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memberikan otonomi kepada pemerintah desa dengan memberikan otoritas untuk mengembangkan dan mengawasi kebijakan desa terutama yang berkaitan dengan pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

H3 : Kebijakan Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan dan analisis data telah dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Peneliti memberi beberapa saran yang berdasarkan kesimpulan yaitu didapatkan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lainnya diluar model yang diteliti pada penelitian ini.
2. Peneliti ini hanya menggunakan satu desa disarankan pada penelitian selanjutnya menggunakan lebih dari satu desa agar bisa untuk saling dibandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, J., Lestari Labangu, Y., Ode Anto, L., & Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, J. (2022). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA LABULU-BULU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN MUNA. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 7(2).
<http://jak.uho.ac.id/index.php/journal/issue/archive>
- N Siti Maryam (2017). Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik.
- Asrul. (2023). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam) Kabupaten Padang Pariaman. *Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Barat*, 05, 1–13.
- Desa, D., Realisasi, T., & Apbdes, P. (2018). *e-mail : 1).* 2018, 99–109.
- Fitriyani, L., & Priyono, N. (2023). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Nglorog Pada Masa Pandemi Covid-19. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(6), 305–316.
- Iii, B. A. B., & Penelitian, A. J. (2015). *METODOLOGI PENELITIAN Definisi Konseptual : alokasi dana desa merupakan penggunaan dana yang ada di*

suatu desa baik itu berasal dari bantuan pemerintah , pendapatan asli desa , sumber pendapatan lainnya yang diperuntukkan bagi pembangunan desa , kesejahteraan , dan pemberdayaan masyarakat .

Maolani, D. Y. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 3. <http://jurnaldialektika.com/>

Rianti, R. (2020). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.*

Sari, M. T. (n.d.). *Titik Mildawati SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA.*

Sari, M. T., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. e-ISSN:2460-0585. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1–17.